

**RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA
KOTA PADANG**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Pendidikan Strata Satu (S1)*



Oleh:

RIRIN FIANA PUTRI

(2008 / 05766)

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2013

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi

Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial

Pada Hari Jum'at Tanggal 2 Agustus 2013

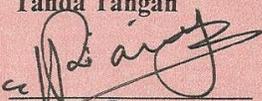
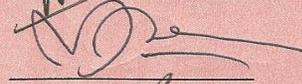
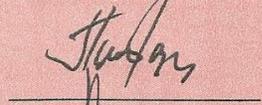
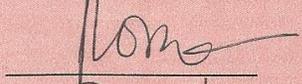
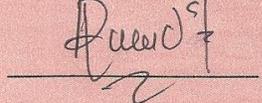
Judul : Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya
Kota Padang
Nama : Ririn Fiana Putri
NIM/BP : 05766/2008
Program Studi : Pendidikan Sosiologi-Antropologi
Jurusan : Sosiologi
Fakultas : Ilmu Sosial

Padang, September 2013

Dewan Penguji Skripsi

Ketua : Erianjoni, S.Sos, M.Si
Sekretaris : Delmira Syafrini, S.Sos., M.A
Anggota : Drs. Ikhwan, M.Si
Nora Susilawati, S.Sos., M.Si
Erda Fitriani, S.Sos., M.Si

Tanda Tangan

ABSTRAK

Ririn Fiana Putri. 05766/2008. Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang. Skripsi, Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang. 2013.

Pasar merupakan salah satu lembaga terpenting dalam perkembangan kegiatan ekonomi, keberadaan pasar perlu adanya pengelolaan, pengelolaan yang dimaksud adalah peranan dinas pasar. Dinas Pasar Kota Padang saat ini mengalami kesulitan dalam penataan Pasar Raya Padang karena keberadaan PKL yang semakin tidak tertata dan jumlahnya bertambah dari tahun ke tahun pasca bencana gempa bumi pada September 2009 lalu. Dalam mengatasi permasalahan ini maka Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang mengeluarkan kebijakan merelokasi para PKL ke tempat yang telah disediakan, namun kebijakan ini mengalami penolakan dari PKL yang berada di Pasar Raya. Berdasarkan hal tersebut, peneliti ingin mengungkap dan mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan PKL tidak mau untuk direlokasi.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori pilihan rasional yang dikemukakan oleh James C. Coleman. Coleman mengungkapkan dalam teori ini memusatkan perhatian pada aktor yang mempunyai tujuan yang ditentukan oleh nilai atau pilihan (*preferensi*) yang rasional. Aktor dipandang berupaya mencapai keuntungan maksimal dalam mencapai tujuannya dengan cara melakukan pilihan terhadap penggunaan sumber daya secara rasional. Sama halnya dengan PKL yang berada di Pasar Raya Padang, mereka tidak mau direlokasi karena tempat yang mereka tempati sekarang adalah yang menurut mereka rasional dengan berbagai alasan yang mereka kemukakan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe studi kasus instrinsik. Teknik pemilihan informan dengan teknik *purposive sampling* dengan jumlah informan 32 orang, jumlah petugas dinas pasar 7 orang dan PKL berjumlah 25 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi serta dianalisis dengan teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Langkah-langkahnya yaitu mereduksi data, mendisplay data dan penarikan kesimpulan akhir.

Hasil penelitian mengungkap bahwa PKL tidak mau untuk direlokasi disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut (1) Faktor Internal yang meliputi (a) Harga sewa yang mahal (b) Faktor Lokasi yang tidak strategis (2) Faktor Eksternal yang meliputi (a) Faktor Manajemen oleh Dinas Pasar karena faktor ini yang berkaitan dengan manajemen penataan relokasi dan (b) Kebijakan pemerintah yang tidak memihak PKL (c) Keikutsertaan partai politik. Masalah ini seharusnya dapat diatasi dengan menjalin kerjasama dan mengatur komunikasi yang baik agar tercipta kondisi yang kondusif di Pasar Raya Kota Padang.

KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan judul **”Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang”**. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan Strata 1 pada Jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapat bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Erianjoni, S.Sos, M.Si selaku pembimbing 1 dan ibu Delmira Syafrini, S. Sos, M. A sebagai pembimbing II selaku, beserta bapak dan ibu tim penguji ujian skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan saran yang bermanfaat sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian terima kasih kepada bapak Adri Febrianto, S. Sos, M.Si sebagai Ketua Jurusan dan Ibu Nora Susilowati, S.Sos, M.Si sebagai Sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua serta seluruh keluarga yang telah memberikan dorongan moril dan materil kepada penulis. Ucapan terima kasih yang sama juga penulis sampaikan kepada seluruh mahasiswa Sosiologi Antropologi khususnya rekan-rekan seperjuangan di Program Studi Antropologi Angkatan 2008.

Penulis menyadari skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritikan dan masukan yang bersifat membangun

agar skripsi ini menjadi lebih baik. Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat untuk kita semua.

Padang, Juni 2012

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teoritis	8
F. Penjelasan Konsep	10
1. Relokasi	10
2. Pedagang Kaki Lima (PKL)	10
G. <i>Metodologi Penelitian</i>	10
1. Lokasi Penelitian	10
2. Pendekatan dan Tipe Penelitian	11
3. Teknik Pemilihan Informan	12
4. Teknik Pengumpulan Data	13
a. Observasi	13
b. Wawancara.....	15
c. Studi Pustaka dan Dokumentasi.....	16
5. Triangulasi Data	16
6. Analisis Data	18

BAB II GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Pasar Raya Kota Padang.....	21
1. Sejarah Berdirinya Pasar Raya Kota Padang	21
2. Pengelolaan Pasar Raya Kota Padang	23
a. Dinas Pasar Kota Padang.....	23
b. Visi dan Misi Dinas Pasar	23
c. Tugas Pokok Dinas Pasar	24
d. Fungsi Dinas Pasar	24
e. Kewewengan Dinas Pasar	25
f. Struktur Dinas Pasar	26
3. Kondisi Pasar Raya Padang.....	26
B. Lokasi Keberadaan Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang	27
C. Gambaran Para Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang.....	27

BAB III RELOKASI PEDAGANG KAKI LIMA DI PASAR RAYA PADANG

1. Faktor Internal.....	33
2. Faktor Eksternal	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	51
B. Saran	52

DAFTAR PUSTAKA	53
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Penelitian
3. Daftar Informan
4. Gambar Pasar Raya Padang sebelum dan setelah gempa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasar merupakan salah satu lembaga yang paling penting dalam industri ekonomi, pasar juga salah satu penggerak utama dinamika kehidupan ekonomi. Keberadaan pasar juga berperan dibidang perkembangan ekonomi budaya yaitu sebagai tempat interaksi, komunikasi dan informasi serta tempat keramaian dan hiburan sehingga terjadi pembauran dan pembaharuan. Pasar mempunyai arti sebuah tempat terjadinya pertemuan dan interaksi antara penjual dan para pembeli. Dalam pengertian yang sederhana pasar merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar sebagai mekanisme (bukan hanya sekedar tempat) yang dapat menata kepentingan pihak pembeli terhadap kepentingan pihak penjual¹.

Keberadaan pasar sangat berpengaruh dalam bidang perekonomian, maka perlu ada pengelolaan yang terstruktur agar terciptanya fungsi dan situasi pasar yang semestinya. Pengelolaan yang dimaksud adalah peranan dinas pasar yang seharusnya mampu menata pasar, menertibkan pasar, dan mendistribusikan produksi pasar².

Saat ini begitu banyak persoalan yang dihadapi oleh dinas pasar di beberapa kota besar di Indonesia, salah satunya persoalan yang muncul dalam tentang pengelolaan/ penataan pasar. Jika dilihat penataan pasar sekarang mengalami

¹ Damsar. 2002. Sosiologi Ekonomi. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada

² Data dari Dinas Pasar Kota Padang Pengelolaan Pasar Raya Kota Padang

ketidakteraturan. Ketidakteraturan ini disebabkan oleh keberadaan pedagang kaki lima (PKL) yang jumlahnya melebihi kapasitas tempat berjualan di pasar³. Keberadaan PKL merupakan realita saat ini, kehadiran mereka tidak hanya dari perspektif ekonomi tetapi juga menyangkut aspek sosial budaya⁴. PKL bermanfaat bagi masyarakat luas terutama bagi yang sering memanfaatkan jasanya, namun sekarang keberadaan PKL menimbulkan permasalahan sosial dan lingkungan berkaitan dengan masalah kebersihan, keindahan dan ketertiban suatu kota⁵.

Fenomena ini juga terjadi di Pasar Raya Kota Padang Provinsi Sumatera Barat. Seiring dengan meningkatnya pembangunan serta mobilitas sosial masyarakat Kota Padang, maka sektor informal banyak dipilih oleh masyarakat luas yang terbukti dengan jumlah mencapai 2030 PKL hingga tahun 2013⁶. Pertumbuhan sektor informal seperti PKL membuat Pasar Raya Kota Padang semakin tidak teratur. Ketidakteraturan ini semakin parah pasca gempa bumi pada September 2009 lalu, banyak infrastruktur termasuk Pasar Raya Kota Padang yang merupakan pusat perekonomian Kota Padang juga ikut rusak dan mengakibatkan perubahan.

Salah satu perubahan yang terjadi di Pasar Raya Kota Padang pasca gempa bumi September 2009 adalah perubahan dalam tatanan pasar, perubahan tersebut diakibatkan oleh PKL, karena mereka kehilangan tempat untuk berjualan sehingga para PKL menempati seperti badan jalan dan lahan parkir yang mengakibatkan

³ Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta . Bumi Aksara

⁴ Mustafa, ali. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal*. Malang. Inspire Indonesia

⁵ Budiman, Bambang. 2010. *Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang kaki lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal*. Skripsi UNDIP

⁶ Data dari Dinas Pasar Kota Padang 2013

keadaan Pasar Raya semraut dan arus lalu lintas menjadi sangat terganggu, dengan permasalahan tersebut maka Pemerintahan Kota (Pemko) mengeluarkan Peraturan kota yang berisi tentang pengaturan PKL. Demi kebijakan bersama maka Pemkot Padang dan Dinas Pasar Kota Padang mengeluarkan peraturan berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang, demi kelancaran arus lalu lintas dan tersedianya lokasi kondusif, aturan tersebut diantaranya adalah :

(1) Tidak dibenarkan menggelar barang dagangannya melewati garis batas yang telah ditentukan. (2) PKL mulai menggelar barang dagangannya dari pukul 17.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB. (3) Setelah berjualan tidak dibenarkan meninggalkan barang dagangan, lapak-lapak, meja, kursi, terpal pada jalan, trotoar, selasar (teras) toko dan gang-gang pertokoan. (4) Lahan parkir diperuntukkan untuk parkir kendaraan, tidak boleh dialihkan fungsikan untuk PKL sebelum pukul 17.30 WIB. (5) Untuk lokasi parkir bendi ditempatkan di jalan Sandang Pangan dan tidak dibenarkan di jalan Pasar Raya. (6) Apabila poin satu 1 sampai 4 tidak diindahkan maka bagi pedagang akan dilakukan penyitaan barang dagangannya dan untuk juru parkir dibatalkan kontrak kerjanya melalui dinas perhubungan⁷.

Adanya peraturan di atas Pemko Kota Padang berharap keberadaan PKL kembali tertata, tetapi realitasnya PKL di Pasar Raya Kota Padang jauh dari yang diharapkan. Semakin diterapkan peraturan untuk penataan pasar justru pasar semakin tidak tertata, keberadaan PKL semakin tidak jelas. Andika (25) yang salah satu contoh PKL yang memakai lahan parkir untuk berjualan⁸. Lina (31) menggelar barang dagangannya di badan jalan lalu lintas angkot, gerobak dagangan menempati

⁷ Surat Peringatan dari Dinas Pasar Kota Padang Nomor : 511.2.1295.IX / PS.2012 mengenai Penetapan dan pengaturan PKL

⁸ Hasil wawancara dengan pedagang jam (tanggal 18 januari 2013)

setengah jalan dari tempat berhentinya angkot dari berbagai jurusan di Kota Padang⁹.

Dalam hal ini, untuk mencegah kembali terjadinya kesemrautan maka Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang telah mengeluarkan kebijakan mengenai tempat berjualan para PKL. Kebijakan tersebut adalah relokasi untuk para PKL yang berada di Pasar Raya Padang, menurut pemerintah kebijakan ini dikeluarkan di samping memikirkan masalah penataan pasar menjadi lebih baik ini, mereka juga memikirkan kesejahteraan para PKL dan kelangsungan hidup mereka karena terkait dengan masalah ekonomi yang menjadi mata pencarian pokok para PKL.

Menurut Ruswendi (38 tahun), Pemkot Padang dan Dinas Pasar Kota Padang saat ini sudah memberikan izin para PKL untuk berjualan di kawasan Pasar Raya mulai dari kawasan Air Mancur hingga jalan menuju Jalan Permindo, meskipun mereka ilegal bagi Dinas Pasar Kota Padang. Pada kenyataannya para PKL semakin tidak tertata, untuk itu Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang memberikan solusi dengan merelokasi para PKL ke tempat khusus untuk berdagang yaitu di Pasar Raya Inpres yang baru dibangun berada tepat dibelakang Balai Kota Padang, mereka ditempatkan pada lantai 3 dan 4 tetapi para PKL masih tidak mau menempati dan masih berjualan di kawasan Pasar Raya Kota Padang¹⁰.

Berdasarkan data yang diperoleh dari bapak Erios Rahman (39) kegiatan penertiban telah dilakukan oleh Tim Pembina PKL serta Pengawas Keamanan dan Ketertiban Pasar yang sebagian besar penertiban terdapat di Pasar Raya Kota

⁹ Hasil wawancara dengan pedagang es tebu (tanggal 18 januari 2013)

¹⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Trantib Dinas Pasar Kota Padang (tanggal 18 Februari 2013)

Padang, ini terbukti pada tahun 2012 telah dilakukan 99 kali kegiatan penertiban dengan melibatkan 79 anggota trantib dan pada akhir Februari 2013 telah dilakukan 12 kali dengan anggota 79 orang¹¹. Selain itu pada tanggal 14 Januari 2013 Dinas Pasar Kota Padang juga telah melakukan penertiban bersama Satpol PP, dari penertiban itu banyak dari PKL yang melakukan perlawanan dan ada yang sampai barang-barang dan payung yang digunakan untuk berjualan dibawa oleh Satpol PP. Tujuan dari penertiban ini agar para PKL tidak melanggar aturan dan mau untuk direlokasi ke tempat yang telah disediakan.

Penelitian relevan yang pernah dilakukan terkait penelitian ini adalah Zulmarsal mahasiswa FIS UNP dengan judul Peranan Satuan Satpol PP dan Satuan Koordinasi Ketertiban dan keamanan Kota (SK4) dalam Penertiban PKL di Kota Padang. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Satpol PP dan SK4 adalah satu organisasi kesatuan yang sama-sama bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan kota, dan koordinasi dan peranannya dalam penertiban PKL. Hasilnya penelitiannya mengungkapkan keberadaan Satpol PP dan SK4 masih belum mampu untuk menciptakan ketertiban kota, khususnya menyangkut masalah PKL yang masih banyak menggunakan fasilitas umum sehingga menimbulkan kesemrautan dan kemacetan. Berdasarkan penelitian yang relevan tersebut terdapat persamaan dan perbedaan, persamaannya yaitu penelitian tentang penertiban yang dilakukan kepada PKL yang melanggar aturan dari Pemkot Kota Padang. Perbedaannya terletak pada dinas yang terkait dalam penertiban, dalam penelitian yang dilakukan oleh Zulmarsal terdapat kerja sama antara Satpol PP dan SK4 dalam menciptakan

¹¹ Data dari Dinas Pasar Kota Padang dari Tahun 2012 sampai Februari 2013

penertiban, sedangkan penelitian ini ingin melihat pelanggaran yang dilakukan PKL dan kesulitan yang dialami oleh Dinas Pasar Kota Padang dalam menertibkan PKL di Pasar Raya Kota Padang.

Berdasarkan Latar belakang dan realitas yang ada peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang Relokasi yang oleh Dinas Pasar Kota Padang terhadap PKL agar terciptanya menataan terhadap Pasar Raya Kota Padang dengan judul penelitian “**Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang**”

B. Batasan dan Rumusan Masalah

Agar penelitian lebih terarah, maka peneliti membatasi masalah yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada relokasi tempat yang telah dilakukan oleh Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang untuk para PKL di Pasar Raya Kota Padang.

Permasalahan yang dialami Dinas Pasar Raya Kota Padang saat ini adalah kesemrautan yang disebabkan oleh PKL dan kesulitan yang dialami oleh Dinas Pasar Kota Padang dalam menertibkan PKL. Pasar Raya Kota Padang semakin tidak teratur pasca gempa bumi pada September 2009 yang mengakibatkan infrastruktur termasuk Pasar Raya Kota Padang ikut rusak dan mengalami perubahan. Perubahan tersebut meliputi tatanan pasar yang semakin semraut yang disebabkan oleh PKL yang kehilangan tempat berjualan sehingga mereka menempati badan jalan dan lahan parkir, yang mengakibatkan keadaan Pasar Raya semraut dan arus lalu lintas sangat terganggu.

Dari permasalahan tersebut maka Pemkot Padang mengeluarkan Peraturan Kota yang berisi tentang pengaturan mengenai lokasi, syarat, jadwal untuk

berjualan bagi para PKL. Semakin diterapkannya peraturan tetapi keadaan pasar semakin tidak tertata, dalam hal ini untuk mencegahnya terjadinya kembali kesemrawutan maka Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang mengeluarkan kebijakan dengan melakukan relokasi para PKL ke tempat yang telah disediakan yaitu di di Pasar Raya Inpres yang baru dibangun berada tepat belakang Balai Kota Padang, mereka ditempatkan pada lantai 3 dan 4 yang telah disediakan oleh Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang dengan fasilitasnya yang lengkap akan tetapi para PKL masih tidak mau menempati dan masih berjualan di kawasan Pasar Raya Kota Padang, sebelumnya tempat telah disediakan oleh pemerintah seperti kios-kios darurat yang dibuat untuk para pedagang yang kehilangan tempat mereka berjualan, lokasi tersebut berada di sepanjang Jalan Pasar Raya dan Jalan Imam Bonjol.

Kebijakan relokasi ini merupakan rekomendasi dari Pansus DPRD yang dikeluarkan pada 10 Februari 2010, rekomendasi tersebut terkait dengan laporan relokasi pasar, terminal dan bantuan gempa. Draft laporan relokasi pasar yang berisi tentang pembangunan pasar Inpres I, II, III, dan IV dan pemindahan pedagang yang terkena musibah gempa pada September tahun 2009 lalu akan tetapi pada faktanya PKL tetap tidak mau menempatkan lokasi yang telah disediakan.

Berdasarkan permasalahan diatas maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah : *Mengapa PKL di Pasar Raya Padang menolak untuk di Relokasi ke tempat yang telah disediakan Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang ?*

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan faktor penyebab PKL tidak mau untuk direlokasi ke tempat yang telah disediakan.

D. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Secara akademis, penelitian ini dapat menambah literatur dan sebagai kajian ilmiah tentang Pedagang Kaki Lima dan mata kuliah Sosiologi Perkotaan.
2. Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pemerintah Kota Padang untuk mengkaji lagi permasalahan tentang Pedagang kaki Lima khusus di Kota Padang.

E. Kerangka Teori

Penulis menggunakan Teori Pilihan Rasional yang dikemukakan oleh James S. Coleman dalam mengkaji dalam mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan PKL menolak untuk direlokasi di Pasar Raya Kota Padang. Teori pilihan rasional memusatkan perhatian pada aktor. Aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau mempunyai maksud. Artinya, aktor mempunyai tujuan dan tindakannya tertuju pada upaya untuk mencapai tujuan itu. Aktor pun dipandang mempunyai pilihan (atau nilai, keperluan). Teori pilihan rasional tak menghiraukan apa yang menjadi pilihan atau apa yang menjadi sumber pilihan aktor. Hal yang

penting adalah kenyataan bahwa tindakan dilakukan untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan tingkatan pilihan aktor¹².

Coleman mengungkapkan bahwa "Tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (*preferensi*)". Untuk maksud yang lebih teoritis, Coleman menjelaskan bahwa aktor rasional adalah aktor yang melihat tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka. Menurut Coleman ada dua unsur utama dalam teori pilihan rasional yaitu aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor.¹³

Dalam mengejar tujuan tertentu, aktor tentu memperhatikan biaya tindakan. Seorang aktor mungkin memilih untuk tidak mengejar tujuan yang bernilai sangat tinggi bila sumber dayanya tidak memadai, bila peluang untuk mencapai tujuan itu mengancam peluangnya untuk mencapai tujuan yang sangat bernilai. Aktor dipandang berupaya mencapai keuntungan maksimal dalam mencapai tujuannya dengan cara melakukan pilihan terhadap penggunaan sumber daya secara rasional¹⁴.

PKL di Pasar Raya Kota Padang yang menolak untuk direlokasi pada dasarnya memiliki alasan dalam memutuskan tindakan yang menurut mereka sendiri rasional. Tindakan yang mereka pilih memiliki tujuan, dimana tujuan mereka selain memenuhi kebutuhan dan mereka menolak karena peraturan tersebut tidak sesuai dengan apa mereka inginkan. Tempat yang mereka tempati sekarang

¹² Wrihatnolo, Randy R, dkk. 2007. *Manajemen Pemberdayaan. Sebuah Pengantar dan Panduan Untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia. Halaman 104.

¹³ Ritzer, George dkk. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Halaman 394

¹⁴ Wrihatnolo. Randy R. Dkk. *Op.Cit*. Halaman 104.

menurut mereka adalah yang paling tepat karena sepanjang Jalan Pasar Raya tersebut banyak pembeli yang berbelanja dari pada daerah relokasi di belakang balai kota.

F. Penjelasan Konsep

a. Relokasi

Relokasi adalah suatu upaya menempatkan kembali suatu kegiatan tertentu ke lahan yang sesuai dengan peruntukannya. Relokasi dalam penelitian ini adalah pemindahan para PKL di Pasar Raya Kota Padang ke tempat yang telah disediakan oleh Pemko dan Dinas Pasar Kota Padang¹⁵. Relokasi yang dimaksud di sini adalah pemindahan para PKL dari lokasi lama ke lokasi baru, lokasi tersebut adalah dari jalan Pasar Raya, sandang ke Pasar Inpres I pada lantai 3 dan 4.

b. Pedagang Kaki Lima (PKL)

Pedagang Kaki Lima adalah orang/ perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang dapat dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebagian/seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukan bagi tempat usaha/ berjualan¹⁶.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Kota Padang, Sumatera Barat, tepatnya di Pasar Raya Kota Padang, lokasi penelitian dimulai dari air mancur hingga jalan ke arah jalan Permindo (batas Simpang Bioskop Mulia), lokasi ini yang merupakan

¹⁵ http://organisasi.org/pengertian_definisi_relokasi(diakses pada tanggal 8 Mei 2013)

¹⁶ Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Pedagang Kaki Lima

kawasan di bawah pengawasan Dinas Pasar Kota Padang. Alasan pemilihan lokasi ini adalah peneliti melihat ada 450 PKL yang berjejeran dan tidak teratur¹⁷, selain itu pada umumnya PKL di lokasi ini melakukan dan PKL yang di lokasi ini menolak untuk direlokasi oleh Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang.

2. Pendekatan dan Tipe Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, alasan menggunakan pendekatan kualitatif ini karena peneliti berasumsi dengan memakai pendekatan ini dapat mendeskripsikan permasalahan yang diteliti secara mendalam dan menyeluruh, mengenai penolakan PKL di Pasar Raya Kota Padang untuk direlokasi. Penelitian yang dilakukan adalah untuk mendeskripsikan dan mengidentifikasi kondisi yang terjadi dan data-data dengan semaksimal mungkin.

Tipe penelitian yang dilakukan adalah studi kasus intrinsik. Studi kasus intrinsik merupakan studi yang dilakukan karena ingin mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang suatu kasus khusus yaitu tentang "Relokasi Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang". Alasan pemilihan bukan karena mewakili kasus lain tetapi karena dengan segala kekhususannya kasus ini memang menarik sehingga pendekatan ini dapat digunakan dalam menggambarkan keadaan-keadaan yang terdapat dalam situasi-situasi tertentu dan tepat untuk menemukan fakta yang ada dilapangan.

3. Pemilihan Informan Penelitian

Informan merupakan subjek penelitian yang ditentukan sebagai sumber informasi yang relevan dengan permasalahan penelitian. Pemilihan dilakukan secara *purposive sampling* (sampel bertujuan) dengan maksud peneliti menentukan sendiri informan penelitian yang diambil sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan¹⁸ yakni para tokoh yang terlibat secara langsung di dalam masalah Relokasi pada pedagang kaki lima di Pasar Raya Kota Padang. Berdasarkan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, maka subjek dalam penelitian ini adalah PKL yang berada di Pasar Raya Kota Padang yang berjualan, dan Dinas Pasar Raya Kota Padang dan pengunjung Pasar Raya Padang.

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah PKL yang lebih \pm 5 tahun sudah berjualan di Pasar Raya Padang, petugas Dinas Pasar Padang yang terkait dalam penyelesaian relokasi PKL di Pasar Raya Padang. Informan dalam penelitian ini berjumlah 32 orang yang diambil berdasarkan azas kejenuhan data yang artinya pengambilan informan dihentikan karena peneliti merasa data yang diperoleh telah cukup mencapai kejenuhan data dan telah sesuai pedoman wawancara dan tujuan penelitian. Jumlah informan tersebut dengan rincian sebagai berikut : Petugas Dinas Pasar Kota Padang berjumlah 7 informan, PKL di Pasar Raya berjumlah 25 informan.

¹⁸ Sukardi, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT Bumi Aksara

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah metode paling dasar untuk memperoleh informasi tentang dunia sekitar. Observasi yang dipakai adalah observasi partisipan yang merupakan kegiatan keseharian manusia dengan menggunakan panca indera mata sebagai alat bantu utamanya selain dari panca indera lainnya seperti telinga, penciuman, mulut dan kulit.¹⁹

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah partisipasi pasif (*passive participation*). Dalam hal ini peneliti datang ke tempat orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Teknik observasi ini digunakan untuk pengamatan dan berperan serta karena peneliti memberitahukan identitas sebagai peneliti kepada objek dan sarannya.

PKL di Pasar Raya Kota Padang sebenarnya sudah sering peneliti perhatikan, peneliti melihat aktivitas yang dilakukan oleh para PKL yang menggelar barang dagangannya disepanjang badang jalan lalu lintas dan area parkir di Pasar Raya Kota Padang. Rata-rata PKL di kawasan tersebut menolak untuk direlokasi oleh Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang.

Pada saat penelitian, peneliti mengamati keadaan Pasar Raya Kota Padang, mulai dari pukul 07.00 WIB, pada pukul tersebut dimana keadaan pasar jauh dari keadaan semraut karena pada saat itu pasar bersih dari para pedagang, keadaan lalu lintas lancar tidak ada halangan ataupun jauh dari kata macet. Keadaan tersebut hanya berlaku sampai pukul 10.00 WIB saja karena dari pukul tersebut para

¹⁹ Burhan Bungin. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta; Penerbit Kencana Prenada Media

pedagang sudah membuka lapak mereka dan mulai meramaikan jalan di sepanjang Jalan Pasar Raya hingga arah menuju Jalan Permindu, Keadaan Pasar Raya begitu berubah mulai sesak, sempit, macet, dan semraut.

Kemudian dari keadaan tersebut peneliti mulai mengamati keseharian pedagang, mulai membuka meja berjualan, bagaimana mereka berjualan, memanggil para pedagang, membayar tagihan yang datang hingga mereka menutup dagangan mereka. Peneliti mulai mencari tahu mereka para pedagang yang direlokasi, peneliti juga mengamati keadaan tempat mereka berjualan.

Peneliti juga mengamati tempat daerah relokasi untuk para pedagang, setelah diamati sangat berbanding jauh di daerah yang mereka tempati setiap harinya, keadaan relokasi ini dilengkapi kios-kios yang disewakan kepada pedagang, lokasi ini berlantai 4 dan dilengkapi eskalator untuk mempermudah jalan menuju ke lantai atas.

Pada saat penelitian yang dirasakan oleh peneliti begitu banyak mulai dari fakta baru yang ditemukan dan kesulitan pada saat memperoleh informasi dan para informan. Terkait fakta baru yaitu ada pengakuan baru yang ditemukan oleh peneliti dari para pedagang maupun dari petugas dinas pasar, hal ini membuat peneliti terus mencari fakta yang lebih. Kesulitan tentu juga dirasakan oleh peneliti mulai dari memperoleh informasi, menunggu informasi selesai berjualan, menunggu informan dari dinas pasar yang sedang bertugas, pedagang yang tidak mau diwawancara karena sibuk berjualan, dan tidak mau didokumentasi (difoto saat wawancara).

2. Wawancara

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian adalah wawancara mendalam untuk mendapatkan data dan informasi secara langsung dengan bertatap muka agar mendapatkan informasi lengkap tentang topik yang diteliti. Teknik wawancara ini digunakan karena dianggap mampu menggali semua informasi dari semua pihak yang peneliti melihat adanya masalah penolakan para PKL untuk direlokasikan ke tempat yang telah disediakan.

Penelitian ini juga menggunakan teknik wawancara terbuka, karena wawancara dilakukan dalam kondisi subjek mengetahui bahwa sedang dilakukan wawancara untuk mengetahui alasan para PKL menolak untuk direlokasi. Wawancara dilakukan dengan PKL di Pasar Raya Kota Padang pada waktu pagi, sore dan malam dimana para PKL sedang menggelar aktivitas berdagang, peneliti melakukan pendekatan terhadap pedagang dengan cara mengadakan transaksi membeli dagangannya. Wawancara juga dilakukan dengan pihak dari Dinas Pasar Kota Padang.

Pertama yang dilakukan peneliti adalah membeli barang dagangan mereka, setelah membeli peneliti mulai bertanya disela-sela melakukan jual beli, setelah sedikit bertanya barulah pedagang mulai bercerita pada waktu tersebut, peneliti dapat berkomunikasi dengan baik, dalam komunikasi tersebut peneliti tentu mendapat kesulitan karena wawancara dilakukan disela-sela mereka berdagang, dan mendapatkan data itu hanya sebentar. Untuk mendapat informasi lebih peneliti melanjutkan besok hari.

Peneliti mulai melakukan wawancara pada pagi hari pukul 10.00 WIB di Dinas Pasar Kota Padang terutama dengan petugas yang terkait soal relokasi pasar, pada pukul 15.00 WIB di lanjutkan langsung ke para pedagang untuk diwawancara. Wawancara dengan para pedagang tidak hanya dilakukan pada siang dan sore hari saja tetapi menjelang malam hari karena pada waktu itu para pembeli sudah sepi dan para waktu tersebut sudah bersiap-siap untuk pulang dan menyimpan barang dagangannya. Pada jam ini dilakukan penelitian karena di anggap tidak mengganggu pedagang berjualan, banyak juga para pedagang diwawancara pada jam tertentu karena mereka tidak mau diganggu dan takut barang mereka tidak laku.

Peneliti dalam melaksanakan wawancara menggunakan pedoman wawancara yaitu terkait pertanyaan untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan catatan lapangan, dan untuk melengkapi informasi, peneliti juga melakukan studi dokumentasi di kantor Dinas Pasar Kota Padang dan ditambah dengan foto-foto pada saat wawancara dengan para PKL.

3. Studi Pustaka dan Dokumentasi

Studi pustaka dan dokumentasi ini peneliti lakukan sebagai data sekunder dalam penelitian dengan cara mencari dan mempelajari dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Data sekunder tersebut bisa berupa visual dan audio visual, baik dari pustaka, internet, majalah maupun koran yang berhubungan dengan PKL.

4. Triangulasi Data

Agar data yang diperoleh valid, maka penelitian ini menggunakan teknik triangulasi data. Hal tersebut dilakukan dengan cara triangulasi sumber berupa

pertanyaan yang diajukan kepada berbagai sumber (informan) baik dari PKL dan Dinas Pasar Raya Kota Padang.

Triangulasi juga dilakukan dengan cara triangulasi waktu. Penelitian tidak hanya dilakukan dalam satu waktu saja tapi dilakukan secara berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Triangulasi juga dilakukan dengan cara triangulasi teknik yaitu terhadap teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Apabila dengan ketiga teknik pengumpulan data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka penulis melakukan diskusi lebih lanjut kepada informan untuk mendapatkan data yang benar²⁰.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan metode wawancara yang ditunjang dengan metode observasi pada saat wawancara dilakukan. Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan yang relatif sama kepada informan yang berbeda yang bertujuan untuk mendapatkan data secara akurat. seperti data yang didapat tentang relokasi PKL di Pasar Raya Padang, PKL, petugas Dinas Pasar Padang dan pengunjung pasar yang dilakukan berkali-kali dan tidak hanya dengan satu orang saja namun dengan beberapa orang dengan tujuan agar data-data yang diperoleh lebih akurat.

Begitu juga dengan observasi dan dokumentasi dilakukan secara berulang-ulang untuk melengkapi dan mencocokkan dengan hasil wawancara yang telah dilakukan sehingga mendapatkan ketepatan informasi dari hasil penelitian. Observasi dilakukan dengan mengamati kondisi tempat para PKL berjualan sekarang dan tempat relokasi, mengamati kegiatan berjualan.

²⁰ Matthew B. Miles. A. Micahel Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, UI Press, Jakarta, 1992, Hlm 16-20

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah teknik analisis interaktif Miles dan Huberman. Peneliti memilih teknik analisis data tersebut karena menurut peneliti teknik tersebut mampu untuk menganalisis data-data hasil penelitian tentang anak putus sekolah pada keluarga mampu. Menurut Miles dan Huberman²¹ analisis interaktif adalah "Kegiatan analisis yang dilakukan sebagai suatu inisiatif berulang-ulang secara terus menerus sehingga membentuk suatu proses siklus interaktif (berhubungan satu sama lain)". Ada tiga komponen kegiatan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

a. Reduksi Data,

Reduksi data yaitu merujuk pada proses pemilihan, pemokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan pentransformasian "data mentah" yang terjadi dalam catatan-catatan lapangan tertulis. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang mempertajam, memilih, memfokuskan, membuang, dan menyusun data dalam suatu cara dimana kesimpulan akhir dapat digambarkan dan diverifikasikan.

b. Model Data (Data Display).

Model adalah suatu kumpulan informasi yang tersusun yang membolehkan pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Bentuk yang paling sering dari model data kualitatif selama ini adalah teks naratif yang berasal dari catatan lapangan yang masih berserakan, tidak berurutan dan sangat luas. Model tersebut mencakup berbagai jenis matrik, grafik, jaringan kerja, dan bagan. Semua dirancang untuk merakit informasi yang tersusun dalam suatu yang dapat diakses secara

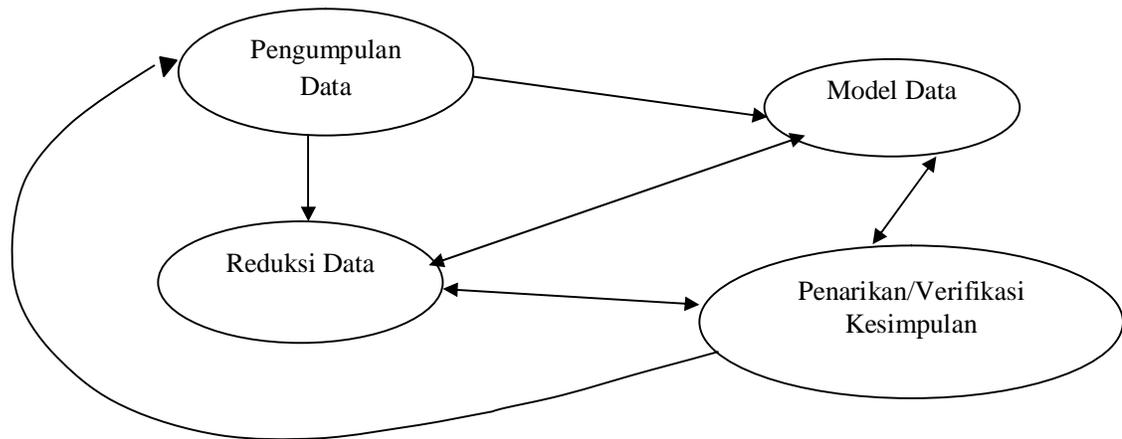
²¹ Emzir. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Analisis Data*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
Halaman 129-135

langsung, bentuk yang praktis, dengan demikian peneliti dapat melihat apa yang terjadi dan dapat dengan baik menggambarkan kesimpulan.

c. Penarikan/Verifikasi Kesimpulan.

Langkah ketiga dari aktivitas analisis adalah penarikan dan verifikasi kesimpulan. Dalam hal ini secara ringkas, makna muncul dari data yang teruji kepercayaannya, kekuatannya, konfirmabilitasnya yaitu validitasnya. Dengan cara lain kita berhenti dengan cerita-cerita menarik tentang kebenaran yang tidak diketahui dan bermanfaat.

Ketiga tahap tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1: Komponen Analisis Data: Model Interaktif

Dalam tinjauan ini ketiga jenis aktivitas analisis dan aktivitas pengumpulan data itu sendiri membentuk suatu proses siklus interaktif. Peneliti secara mantap bergerak di antara ke empat model ini selama pengumpulan data, kemudian bergerak bolak balik diantara reduksi data, model, dan penarikan/verifikasi kesimpulan untuk sisa studi tersebut.

Dalam pengertian ini, analisis data kualitatif merupakan suatu inisiatif berulang-ulang secara terus menerus. Masalah reduksi data, model, dan penarikan/verifikasi kesimpulan masuk ke dalam gambar secara berurutan sebagai episode-episode analisis masing-masing yang lain. Tetapi dua masalah yang lain selalu menjadi bagian dari dasar sehingga setiap tahapan kegiatan analisis saling berhubungan satu sama lain membentuk proses secara interaktif.

BAB II

PASAR RAYA PADANG

A. Sejarah, Visi dan Misi dan Kondisi Pasar Raya di Kota Padang

1. Sejarah Berdiri Pasar Raya di Kota Padang

Pada awal abad ke XIX setelah ditemukan tambang batu bara di Ombilin dan terbukanya jalan kereta api dari Sawahlunto ke Padang, maka perkembangan pusat kegiatan Kota Padang pada waktu itu semakin pesat. Adanya Sungai Batang Harau yang dijadikan sebagai tempat pelabuhan terletak, maka para pedagang di luar negeri berdatangan ke Sungai Batang Harau tersebut, dengan kondisi tersebut maka dibukalah tambang batu bara Ombilin serta dibukanya jalan kereta api tersebut. Seiring adanya pembangunan tersebut maka dibangunlah juga pelabuhan Teluk Bayur yang dipergunakan untuk kegiatan operasional kapal dalam pengangkutan batu bara.

Adanya barang-barang ekspor impor melalui pelabuhan Teluk Bayur maka Kota Padang semakin diramaikan oleh para pedagang dalam melakukan usaha dibidang perdagangan, dalam bidang tersebut bertambahnya juga kesibukan melakukan ekspor barang-barang komoniti yang menyebabkan timbulnya keinginan dan ide-ide dari orang-orang Kota Padang untuk mendirikan pasar di daerah Kota Padang²².

²² Data dari Dinas Pasar Kota Padang

Para pedagang dengan bermotivasi semangat dan keinginan yang besar maka didirikan pasar pertama di Kota Padang dengan bernama Pasar Mudiek, adanya Pasar Mudiek tersebut yang didirikan oleh orang-orang dari Kota Padang maka orang Tiong Hoa berkeinginan untuk mendirikan pasar, tapi kemudian pasar tersebut terbakar. Penduduk Kota Padang pada waktu itu terdiri dari 4 suku yaitu : Belanda totok, Tiong Hoa, Arab dan Kelling, Indo, Bumi putra (putra asli Kota Padang).

Pada masa itu salah seorang penduduk Kota Padang terkaya bernama Leasy Tiong Hoa diangkat oleh Belanda sebagai ketua toko Cina dengan pangkat Mayor, beliau juga ikut mendirikan pasar di daerah Klenteng tepatnya di Jalan Niaga yaitu Pasar Tanah Kongsu akan tetapi pasar itu tidak bertahan lama karena terbakar. Dalam permasalahan maka pasar itu dijual lagi kepada seorang Famili dari Leasy yang bernama Roan Hoat, Penjualan Pasar tersebut pada akhir abad ke XIX sejak adanya Pasar Mudik dan pasar yang didirikan oleh orang Tiong Hoa menjadi mundur. Kemudian dalam abad ke XIX itu mengambil alih Pasar Jawa tersebut dan menggantikannya dengan pedagang pribumi yang sangat tersiksa oleh pajak yang terlalu tinggi, sebab diberi nama Pasar Jawa karena mayoritas penduduk terdiri dari orang-orang Jawa yang datang kemari karena perang Diponegoro dan dibawa oleh tentara Belanda.

Pasar pada abad ke XX mempunyai tonggak dari kayu dan atap seng, karena faktor tersebut yang menyebabkan pasar dikuasai oleh orang-orang Tiong Hoa, sedangkan penduduk asli dipindah ke pedalaman, dan akhirnya keadaan tersebut membuat pedagang kembali lagi berdagang di pasar Jawa, sehingga para pedagang

ramai kembali. Pada tahun 1963 didirikan maket pasar fase I yang dikepalai oleh Walikota Madya Padang yaitu Zainuddin kembali pasar ditambah lagi menjadi beberapa pasar yaitu fase I,II, III IV, V , VI dan fase VII²³.

2. Pengelolaan Pasar Raya Kota Padang

a. Dinas Pasar Kota Padang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah dan Peraturan Walikota Padang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Pasar Kota Padang, Dinas Pasar Kota Padang berwenang mengelola seluruh Pasar yang dimiliki dan di bawah pengawasan Pemerintah Kota Padang yang terdiri dari Pasar Raya Padang, Pasar Lubuk Buaya, Pasar Ulak Karang, Pasar Tanah Kongsu, Pasar Simpang Haru, Pasar Banar Buat, Pasar Alai, Pasar Siteba, dan Pasar Aie Pacah.

Dalam melaksanakan tugas pokok mengelola pasar, dinas pasar berwenang dalam mengelola aktifitas perdagangan mulai dari penataan pasar, pengembangan pasar, mengelola ketertiban, kebersihan dan keindahan serta pengelolaan penerimaan retribusi pasar.

b. Visi dan Misi Dinas Pasar Kota Padang

Merujuk kepada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 08 tahun 2002 tentang pengolahan dan retribusi pasar, Perda nomor 16 Tahun 2008 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja dinas daerah serta Keputusan Walikota Padang No. 43 tahun 2009 tentang uraian tugas pokok dan fungsi Dinas Pasar

²³ Data Dari Dinas Pasar Kota Padang

Kota Padang, keberadaan SKPD Dinas Pasar adalah perangkat daerah yang diberi kewenangan mengelola Pasar Kota Padang.

VISI

Visi dinas pasar adalah Pasar Kota Padang sebagai pusat perdagangan di Sumatera bagian tengah tahun 2015 yang tertib, aman dan nyaman.

MISI

Untuk Pencapaian tujuan sebagaimana diatas, maka disusun misi dinas pasar sebagai berikut :

- a. Mewujudkan penataan kawasan pasar.
- b. Menciptakan pasar yang aman, tertib, bersih, dan nyaman yang bernuansa rekreasi.
- c. Mewujudkan pelayanan prima kepada pedagang dan pengunjung pasar.
- d. Revitalisasi 16 pasar melalui kerjasama dengan pihak ketiga.
- e. Meningkatkan prasarana pasar yang berwawasan penataan wilayah untuk kegiatan perdagangan.
- f. Meningkatkan pelayanan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah.
- g. Meningkatkan peran aktif investor atau pihak ketiga dalam pengembangan pasar.
- h. Meningkatkan sumber daya alam aparatur dan menyiapkan peraturan penegakan hukum dalam pengolaan pasar.

c. Tugas Pokok Dinas Pasar

Dinas pasar mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan pemerintah daerah dibidang pengelolaan pasar dan kawasan pasar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

d. Fungsi Dinas Pasar

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana diatas, dinas pasar mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibidang pengelolaan pasar, meliputi perencanaan, perumusan kebijaksanaan

daerah serta menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dinas.

- b. Memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan serta mengawasi semua kegiatan pengelolaan pasar.
- c. Memberikan informasi mengenai situasi pasar, saran serta pertimbangan kepada kepala daerah sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan atau membuat keputusan.
- d. Memberikan perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di kawasan pasar.
- e. Mempertanggungjawabkan tugas-tugas dinas, baik teknis di lingkungan dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Memelihara dan meningkatkan kemampuan/prestasi pegawai dinas serta disiplin pegawai.
- g. Mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi/lembaga, baik pemerintah maupun swasta untuk kepentingan dan kelancaran pelaksanaan tugas.

e. Kewenangan Dinas Pasar

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada fungsi di atas, dinas pasar mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- (1) Menghimpun, mengumpulkan, meneliti dan menata pemanfaatan lahan di kawasan pasar serta mengolah data-data tentang kegiatan pedagang dan pengusaha jasa dalam hubungannya dengan penyediaan fasilitas tempat berjualan di kawasan pasar.
- (2) Mempersiapkan, merencanakan, merumuskan kebijakan teknis dan mengatur fasilitas yang bersangkutan dengan pengelolaan, pemberian pelayanan dan jasa kepada masyarakat di kawasan pasar.
- (3) Merencanakan, mengembangkan, manata sarana dan prasarana, serta menata kawasan pasar.
- (4) Melakukan pembinaan dan bimbingan terhadap para pedagang dibidang peningkatan usaha dagang.
- (5) Merencanakan, mengatur dan mengelola perlistrikan dilingkungan pasar.
- (6) Melakukan pungutan retribusi, bea harian pasar dan lainnya atas pemanfaatan fasilitas pasar.
- (7) Membuat pembukuan keuangan retribusi, bea harian pasar dan pendapatan lainnya serta menyetorkannya ke kas daerah.
- (8) Melakukan pengaturan terhadap pelaksanaan pemungutan retribusi dan bea harian pasar.
- (9) Melakukan pengamanan, kebersihan dan menciptakan ketertiban di kawasan pasar.
- (10) Melakukan ikatan kerjasama dalam memanfaatkan fasilitas pasar.
- (11) Membuat draft peraturan terhadap semua pungutan yang diberlakukan di kawasan pasar.

- (12) Mengupayakan penyelesaian pertikaian/perselisihan antara pedagang dan atau pengusaha jasa dalam menjalankan usaha dilingkungan pasar.
- (13) Melakukan pembinaan dan bimbingan tentang K3 dalam lingkungan pasar dan kawasan pasar.
- (14) Melakukan pengawasan terhadap Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban (K-3), toko, kios, los, jalan, gang, taman di kawasan pasar.

f. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Pasar Kota Padang terdiri dari :

- a. Kepala dinas
- b. Sekretariat Dinas
- c. Bidang Pengembangan Pasar
- d. Bidang Pendapatan
- e. Bidang Pemeliharaan Bangunan
- f. Bidang Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

3. Kondisi Pasar Raya Padang

Dilihat dari kegiatan Pasar Raya Pasar Kota Padang sekarang jauh berbanding terbalik sebelum terjadinya bencana gempa bumi pada tahun 2009 yang lalu. Keadaan pasar sudah tidak teratur, banyak para pedagang kehilangan tempat mereka untuk berjualan dan menempati lokasi-lokasi yang tidak semestinya, seperti trotoar, lahan parkir bahkan jalan lalu lintas yang digunakan untuk kendaraan bermotor. Disamping itu kepadatan juga terjadi di Pasar Raya Kota Padang, ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah para pedagang kaki lima setiap tahunnya yang melampaui kapasitas Pasar Raya Kota Padang.

Para pedagang juga mengatakan bahwa mereka memilih berjualan di trotoar, lahan parkir dan jalan karena tidak memiliki tempat lain lagi. Mereka juga mengatakan berjualan di lokasi tersebut juga mendatangkan untung karena banyak para pembeli dibandingkan di tempat yang telah disediakan oleh pemerintah. daerah

untuk relokasi yang baru mereka kesulitan untuk menyewa tempat karena di sana harus membayar uang panjar yang mahal dan harga sewa yang tidak jelas menurut sebagian mereka.

Permasalahan ini yang memutuskan mereka berjualan dilokasi-lokasi tersebut dan mengakibatkan kesemrautan di Pasar Raya Kota Padang. Hal ini juga membuat Dinas Pasar Kota Padang menemukan kesulitan dalam mengatur Pasar Raya Padang.

B. Lokasi Keberadaan Pedagang Kaki Lima Di Pasar Raya Kota Padang

Pasar Raya Kota Padang merupakan salah satu pusat sentral perekonomian di Kota Padang, karena Pasar Raya sebagai penyalur barang-barang ke pasar daerah lainnya. Dilihat dari tahun ke tahun lokasi Pasar Raya Kota Padang semakin dipadati oleh PKL. Banyak para PKL menempati tempat yang bukan diperuntukan untuk mereka, PKL memadati jalan Pasar Raya sampai kearah Jalan Pemindo. Ini membuat lokasi Pasar Raya semakin tidak teratur dan mengalami kesemrautan.

C. Gambaran tentang Para Pedagang Kaki Lima di Pasar Raya Kota Padang

PKL di Pasar Raya Kota Padang merupakan para pedagang usaha kecil yang berada di pasar, sebagian besar pedagang merupakan pedagang yang sudah lama berjualan di Pasar Raya Kota Padang dan ada juga pedagang yang berasal dari daerah lain misalnya dari Solok, Payakumbuh, Batusangkar, Padang Panjang, Pesisir dan Sijunjung. PKL yang berada di Pasar Raya ini adalah pedagang yang mempunyai toko, pasca gempa bumi tahun 2009 yang lalu mereka kehilangan toko mereka karena sebagian besar infrastruktur yang ada di Pasar Raya Kota Padang

runtuh dan hancur. Hal ini membuat mereka memutuskan untuk beralih berdagang area trotoar, lahan parkir dan jalan di sepanjang jalan Pasar Raya, akibat peralihan ini membuat Pasar Raya semakin tidak teratur dan mengganggu proses jalan lalu lintas.

Disamping permasalahan tersebut, permasalahan lain muncul seperti bertambahnya jumlah PKL dari tahun ke tahun mencapai 2030 pedagang dan 450 PKL yang berada di sepanjang Jalan Pasar Raya, ini menyebabkan kepadatan di daerah Pasar Raya Kota Padang. Permasalahan ini semakin membuat Pasar Raya jauh dari yang diharapkan sebagai pusat perekonomian Kota Padang, untuk mengatasi hal ini Pemko Padang dan Dinas Pasar Kota Padang melakukan relokasi terhadap PKL.

Berdasarkan kebijakan relokasi ini merupakan rekomendasi dari Pansus DPRD yang dikeluarkan pada 10 Februari 2010, rekomendasi tersebut terkait dengan laporan relokasi pasar, terminal dan bantuan gempa. Draft laporan relokasi pasar yang berisi tentang pembangunan pasar Inpres I, II, III, dan IV dan pemindahan pedagang yang terkena musibah gempa pada September tahun 2009 lalu, tetapi pada kebijakan ini sebagian para PKL tidak mau direlokasi karena berbagai faktor dan alasannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan temuan di lapangan dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan PKL di Pasar Raya Kota Padang menolak untuk direlokasi secara garis besar terdapat 2 faktor mendasar yaitu (1) Faktor Internal yang meliputi (a) Harga sewa yang mahal (b) Faktor Lokasi yang tidak strategis (2) Faktor Eksternal yang meliputi (a) Faktor Manajemen oleh Dinas Pasar karena faktor ini yang berkaitan dengan manajemen penataan relokasi dan (b) Kebijakan pemerintah yang tidak memihak PKL (c) Keikutsertaan partai politik, faktor ini merupakan faktor yang mendorong para PKL untuk menempati tempat yang mereka anggap pantas karena disamping mereka membayar mahal, mereka juga didukung oleh pejabat dan oknum-oknum yang pro dan kontra terhadap PKL.

Dari kelima faktor tersebut tergambar bergambar berbagai alasan para PKL untuk menolak relokasi dan alasan mereka untuk bertahan berjualan di sepanjang Jalan Pasar Raya sampai ke arah Jalan Permindo. Dari beberapa faktor keikutsertaan partai politik tersebut, dapat dilihat bagaimana seorang pemimpin seharusnya mengarahkan dan mengatur masyarakat dengan baik tetapi pada kenyataannya mereka memanfaatkan kondisi ini untuk kepentingan yang lain bahkan kepentingan pribadi.

B. Saran

- a. Realitas mengenai PKL di Kota Padang memang tidak akan habis dibahas, karena Para PKL cenderung sering dipermasalahkan keberadaannya oleh karna itu bagi pemerintah semestinya mampu memikirkan kembali masalah relokasi agar PKL dapat tertata rapi di Pasar Raya Kota Padang.
- b. Bagi pemerintah perlu mengadakan kerjasama yang baik antara mereka dan PKL agar terjalinnya hubungan yang harmonis antara keduanya dan tidak memanfaatkan keadaan dan kondisi ini untuk kepentingan yang lain ataupun pribadi.
- c. Untuk peneliti yang tertarik mengenai realitas tentang PKL hendaknya lebih mampu meneliti secara mendalam lagi tentang hubungan antara PKL dan pemerintah dalam permasalahan penataan Pasar Raya agar dapat menambahkan kekurangan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi Stematika, Teori, dan Terapan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Budiman, Bambang. 2010. Kajian Lingkungan Keberadaan Pedagang kaki lima di Kawasan Banjaran Kabupaten Tegal. *Skripsi* UNDIP
- Damsar. 2012. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta. Raja Grafindo Persada
- Hariyono, Paulus. 2007. *Sosiologi Kota Untuk Arsitek*. Jakarta. Bumi Aksara
- Insani Yunus, Auliya. 2011. Potret Kehidupan Sosial Ekonomi Pedagang Kaki Lima di Kota Makasar. *Skripsi* Jurusan Sosiologi FISIP Universitas Hasanudin Makasar
- Miles dan Huberman. 1992. *Analisa Data Kualitatif (Edisi Terjemahan)*. Jakarta. UI-Press
- Mustafa, ali. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal*. Malang. Inspire Indonesia
- Ndara, Taliziduhu. 1997. *Budaya Organisasi*. Jakarta. PT. Rineka Cipta
- Ritzer, George dkk. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Santoso dan Zulfa. 2010. *Kriminologi*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Sugiyono. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Zulmarsal. 2010. Peranan Satuan Satpol PP dan Satuan Koordinasi Ketertiban dan keamanan Kota (SK4) dalam Penertiban PKL di Kota Padang. *Skripsi* Jurusan Sosiologi FIS UNP
- Perda Nomor 11 tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Pedagang Kaki Lima
- KUHP (Pasal 489 KUHP – Pasal 569 KUHP) mengatur tentang pelanggaran
- Surat Edaran Walikota Padang Nomor : 511.289.I / PS.2012

Surat Peringatan Dinas Pasar Kota Padang Nomor : 511.2.1295.1X / PS.2012

Sumber Internet:

http://organisasi.org/pengertian_definisi_relokasi (diakses pada tanggal 8 Mei 2013)

<http://posmetropadang.com/> (diakses pada tanggal 21 Juni 2013)

<http://regional.kompasiana.com> (diakses pada tanggal 1 Maret 2013)

<http://social-sciences/sociology> (diakses pada tanggal 1 Maret 2013)

<http://regional.kompasiana.com> (diakses pada tanggal 1 Maret 2013)

<http://padangekspres.co.id/?news=berita> (diakses pada tanggal 21 Juni 2013)

<http://siap-bos.blogspot.com/2009/05/analisis-permasalahan-dan-pemetaan.html> (diakses pada tanggal 21 Juni 2013)